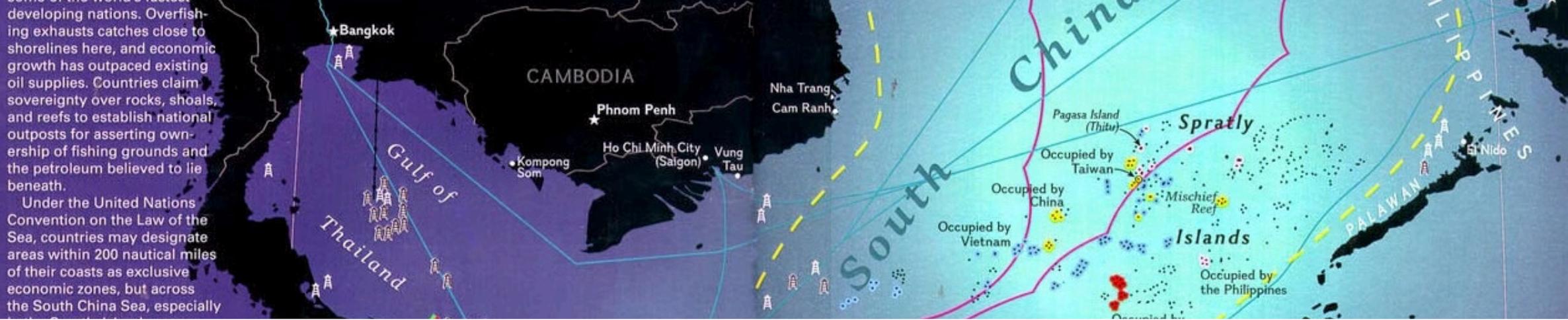


developing nations. Overfishing exhausts catches close to shorelines here, and economic growth has outpaced existing oil supplies. Countries claim sovereignty over rocks, shoals, and reefs to establish national outposts for asserting ownership of fishing grounds and the petroleum believed to lie beneath.

Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, countries may designate areas within 200 nautical miles of their coasts as exclusive economic zones, but across the South China Sea, especially



PIN 2029: Konflik Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan sangat berpotensi tinggi mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global, sehingga masing-masing pihak akan menahan diri (grey area) untuk tidak melakukan tindakan agresif yang meningkatkan eskalasi konflik menjadi perang terbuka hingga lima tahun ke depan.

CSIA. Perkiraan Intelijen Nasional (PIN) 2029 ini merupakan analisis strategis yang meneliti potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan hingga tahun 2029. Analisis ini membahas latar belakang konflik, mulai dari klaim teritorial yang saling tumpang tindih, seperti klaim China terhadap wilayah yang diklaim oleh negara-negara ASEAN, hingga sengketa sumber daya alam seperti minyak dan gas di Kepulauan Spratly. Demikian juga kepentingan strategis kawasan, seperti jalur pelayaran internasional yang penting seperti Selat Malaka dan Laut Sulu, dan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas di Laut Natuna. Selanjutnya menganalisis peta kekuatan negara-negara yang terlibat termasuk militer, ekonomi, dan diplomasi, seperti kekuatan militer China, pengaruh ekonomi Amerika Serikat, dan peran diplomatik ASEAN, serta memproyeksikan dinamika konflik yang mungkin terjadi pada jangka pendek.

Latar Belakang Konflik di Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan merupakan isu kompleks yang melibatkan sengketa wilayah dan sumber daya alam. Sengketa ini melibatkan Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, dengan masing-masing negara mengklaim kepemilikan atas wilayah tertentu. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan berdasarkan "Nine-Dash Line", sebuah garis batas maritim yang kontroversial yang ditentang oleh negara-negara lain di kawasan.

Klaim Tiongkok didasarkan pada argumen historis dan didukung oleh bukti arkeologis. Namun, klaim ini tidak diakui secara internasional dan banyak negara di kawasan menolaknya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menentukan hak atas wilayah maritim berdasarkan garis pantai, yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok.

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan diperparah oleh persaingan ekonomi dan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah yang disengketakan, membangun pulau buatan dan pangkalan militer. Amerika Serikat, sebagai kekuatan regional, telah meningkatkan aktivitas militernya di kawasan untuk melawan pengaruh Tiongkok. Hal ini memicu ketegangan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di kawasan tersebut.

Kehadiran militer yang kuat dari kedua negara di Laut Tiongkok Selatan meningkatkan risiko konflik bersenjata. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat meningkat dengan cepat, terutama jika terjadi insiden di laut yang melibatkan kapal-kapal dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Penting bagi negara-negara di kawasan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional.

Hukum Internasional

Sengketa Laut Tiongkok Selatan melibatkan beberapa negara yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa maritim. UNCLOS menetapkan kerangka hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut, termasuk hak atas wilayah laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

UNCLOS menetapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal, termasuk prinsip "good faith", "peaceful settlement of disputes", dan "non-use of force". Negara-negara yang terlibat dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan seharusnya menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia di UNCLOS, seperti arbitrase atau perundingan. Pelanggaran terhadap UNCLOS dapat mengakibatkan sanksi internasional, termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik.

Salah satu aspek penting dari UNCLOS adalah penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memberikan hak eksklusif bagi negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam konteks Laut Tiongkok Selatan, banyak negara mengklaim ZEE yang tumpang tindih, yang menjadi salah satu faktor utama sengketa. UNCLOS juga mengatur tentang landas kontinen, yaitu wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai meskipun berada di luar batas ZEE.

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa maritim antara negara-negara. ITLOS memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus Laut Tiongkok Selatan, beberapa negara telah mengajukan gugatan ke ITLOS terkait dengan klaim wilayah dan ZEE. Keputusan ITLOS diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa dan membangun stabilitas di kawasan tersebut.

Penerapan hukum internasional melalui UNCLOS menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut, termasuk penyelesaian sengketa. Melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, negara-negara di kawasan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan membangun stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.

Kepentingan Strategis Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah strategis yang memiliki nilai ekonomi dan militer yang sangat penting. Laut ini menyimpan kekayaan sumber daya alam, seperti cadangan minyak dan gas bumi, serta merupakan jalur pelayaran vital untuk perdagangan internasional. Lebih dari 30% perdagangan dunia melewati jalur laut ini, yang menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur pelayaran yang sangat strategis. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi angin dan gelombang.

Bagi Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan merupakan sumber daya ekonomi yang penting untuk mengakses sumber daya alam dan membangun industri maritim. Laut Tiongkok Selatan juga merupakan jalur transportasi utama bagi Tiongkok, yang menghubungkan mereka dengan pasar global dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tiongkok juga memiliki kepentingan militer di wilayah ini, karena memungkinkan mereka untuk mengendalikan jalur pelayaran penting dan mengakses sumber daya di kawasan tersebut.

Bagi negara-negara ASEAN, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur pelayaran penting untuk perdagangan dan sumber daya alam yang penting untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Laut ini juga merupakan sumber makanan laut yang penting, yang mendukung mata pencaharian nelayan di negara-negara ASEAN. Namun, sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan telah menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi negara-negara ASEAN, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di Laut Tiongkok Selatan untuk menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan. Mereka juga ingin mencegah pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan tersebut. Amerika Serikat memandang Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah yang penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah dominasi satu negara di wilayah tersebut.

Laut Tiongkok Selatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan regional. Wilayah ini menjadi titik temu berbagai kepentingan negara-negara di kawasan, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN. Konflik dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut, yang dapat mengakibatkan penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian dan risiko keamanan di Laut Tiongkok Selatan dapat menyebabkan penurunan investasi asing dan membuat negara-negara di kawasan enggan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut.

Peta Kekuatan Negara-negara di Kawasan

Dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sangat jelas, ditandai oleh kekuatan militernya yang kuat, armada kapal perang modern, dan senjata canggih seperti rudal balistik dan pesawat tempur siluman. Ekonomi Tiongkok yang kuat dan pertumbuhannya yang cepat mendukung kekuatan militernya dan memperkuat pengaruhnya di kawasan. Pembangunan pangkalan militer di berbagai pulau dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, memicu kekhawatiran dari negara-negara lain yang memiliki klaim di wilayah tersebut.

Amerika Serikat, sebagai kekuatan regional, juga memiliki pengaruh signifikan di Laut Tiongkok Selatan, dengan kehadiran militer yang besar di Asia Pasifik dan aliansi yang kuat dengan negara-negara di kawasan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Amerika Serikat telah meningkatkan aktivitas militernya di Laut Tiongkok Selatan untuk melawan pengaruh Tiongkok dan menjaga kebebasan navigasi di kawasan. Patroli rutin, latihan militer bersama, dan sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan militer di Laut Tiongkok Selatan merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan posisinya di wilayah tersebut.

Negara-negara ASEAN memiliki kekuatan militer yang beragam. Beberapa negara seperti Vietnam memiliki kekuatan militer yang kuat, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan sejumlah besar pasukan darat. Vietnam telah membangun pulau buatan dan pangkalan militer di Laut Tiongkok Selatan untuk menghadapi klaim Tiongkok. Negara-negara ASEAN telah berupaya meningkatkan kekuatan militer mereka dan meningkatkan kerja sama keamanan untuk menghadapi ancaman Tiongkok, melalui latihan militer bersama dan peningkatan kerja sama intelijen untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

Taiwan memiliki kekuatan militer yang relatif kecil, tetapi memiliki kekuatan teknologi dan industri yang kuat. Taiwan telah meningkatkan kekuatan militernya dalam beberapa tahun terakhir untuk menghadapi ancaman Tiongkok, meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan lautnya, serta mengembangkan program modernisasi militer yang ambisius. Namun, kekuatan militer Taiwan masih terbatas dibandingkan dengan Tiongkok, sehingga Taiwan bergantung pada dukungan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Peta Kekuatan

Negara	Kekuatan Militer	Ekonomi
Tiongkok	Sangat kuat, dengan armada kapal perang modern dan senjata canggih. Memiliki Angkatan Laut terbesar di dunia dengan lebih dari 350 kapal perang.	Sangat kuat, dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Memiliki sumber daya alam yang kaya dan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Amerika Serikat	Sangat kuat, dengan Angkatan Laut terkuat di dunia dan kehadiran militer yang besar di Asia Pasifik.	Sangat kuat, dengan ekonomi terbesar di dunia. Memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional.
Vietnam	Kuat, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan sejumlah besar pasukan darat.	Sedang, dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang dan sektor manufaktur yang kuat.
Filipina	Sedang, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan pasukan darat yang sedang.	Sedang, dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang dan sektor pariwisata yang kuat.
Malaysia	Sedang, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan pasukan darat yang sedang.	Sedang, dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang dan sektor minyak dan gas yang kuat.
Indonesia	Sedang, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan pasukan darat yang besar.	Sedang, dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang dan sumber daya alam yang kaya.
Taiwan	Sedang, dengan Angkatan Laut yang sedang berkembang dan pasukan darat yang sedang.	Kuat, dengan ekonomi yang kuat dan sektor teknologi yang maju.

Dinamika Konflik Jangka Pendek

Dinamika konflik di Laut Tiongkok Selatan diproyeksikan tetap kompleks dan menantang dalam lima tahun ke depan. Tiongkok, dengan kekuatan militer yang kuat dan ekonomi terbesar kedua di dunia, diprediksi akan semakin agresif dalam memperkuat kehadiran militernya di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dilakukan melalui pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer di wilayah yang disengketakan, bertujuan untuk mengontrol wilayah strategis dan menegaskan klaim historisnya. Amerika Serikat, dengan Angkatan Laut terkuat di dunia dan kehadiran militer besar di Asia Pasifik, diperkirakan akan terus menjaga kehadiran militernya di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk melawan pengaruh Tiongkok, menjaga stabilitas regional, dan melindungi kepentingan ekonomi dan militer AS. AS juga mendukung negara-negara di kawasan yang menghadapi ancaman Tiongkok, mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional.

Negara-negara ASEAN, yang memiliki kepentingan strategis di Laut Tiongkok Selatan, diperkirakan akan meningkatkan kekuatan militer dan kerja sama keamanan untuk menghadapi ancaman Tiongkok. Mereka ingin menjaga kebebasan navigasi dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan, serta melindungi sumber daya alam dan wilayah yang disengketakan. Negara-negara ASEAN juga mendorong penyelesaian damai sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Taiwan, dengan kekuatan militer yang sedang berkembang dan ekonomi yang kuat, diproyeksikan akan meningkatkan kekuatan militernya untuk menghadapi ancaman Tiongkok. Taiwan juga akan berupaya untuk mencari dukungan internasional untuk menjaga kemerdekaannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan status quo dan mencegah Tiongkok mengklaim wilayah Taiwan, serta untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan.

Eskalasi konflik dapat terjadi jika terjadi insiden di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan, seperti tabrakan kapal atau serangan udara. Risiko konflik juga meningkat jika Tiongkok terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut dan mengancam kepentingan negara-negara lain. Eskalasi konflik juga dapat terjadi jika Tiongkok melancarkan serangan militer terhadap Taiwan. Persaingan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan, termasuk melalui "Belt and Road Initiative", dapat meningkatkan risiko konflik. Tiongkok menggunakan "Belt and Road Initiative" untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan. Hal ini dapat memicu persaingan dan konflik dengan negara-negara lain. Selain itu, militerisasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dengan pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer di wilayah yang disengketakan, juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan ketegangan. Militerisasi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan di antara negara-negara di kawasan.

Untuk mencegah eskalasi konflik, negara-negara di kawasan harus meningkatkan dialog dan kerja sama. Negara-negara ASEAN harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan militer mereka dan meningkatkan kerja sama keamanan. Amerika Serikat harus terus menjaga kehadiran militernya di kawasan tersebut untuk melawan pengaruh Tiongkok. Penting bagi negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara di kawasan.

Skenario Eskalasi Konflik

Skenario eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan dapat terjadi jika terjadi insiden yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan, seperti tabrakan kapal atau serangan udara. Risiko konflik juga meningkat jika Tiongkok terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut dan mengancam kepentingan negara-negara lain.

Berikut adalah beberapa skenario eskalasi konflik yang mungkin terjadi:

- Tiongkok membangun pangkalan militer di wilayah yang disengketakan, seperti di Kepulauan Spratly atau di Laut China Timur. Hal ini dapat memicu protes dari negara-negara lain yang mengklaim wilayah tersebut, seperti Filipina, Vietnam, atau Malaysia.
- Tiongkok mendekati kapal-kapal negara lain di wilayah yang disengketakan, seperti kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal perang. Hal ini dapat memicu ketegangan dan bahkan bentrokan militer. Tiongkok dapat menggunakan taktik intimidasi untuk memaksa negara-negara lain keluar dari wilayah yang disengketakan.
- Tiongkok melakukan latihan militer di dekat wilayah yang disengketakan, seperti di sekitar Taiwan atau di Laut China Selatan. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi serangan militer.
- Tiongkok menangkap nelayan atau kapal-kapal negara lain di wilayah yang disengketakan, seperti di Laut China Selatan. Hal ini dapat memicu protes dari negara-negara lain dan dapat meningkatkan risiko konflik bersenjata.
- Tiongkok menyerang kapal-kapal negara lain di wilayah yang disengketakan, seperti di Laut China Selatan. Hal ini dapat memicu konflik bersenjata yang luas dan berpotensi melibatkan negara-negara lain di kawasan, termasuk Amerika Serikat.

Jika terjadi insiden yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan, dapat memicu eskalasi konflik. Negara-negara lain di kawasan mungkin akan meningkatkan aktivitas militer mereka di kawasan tersebut untuk melawan pengaruh Tiongkok. Amerika Serikat mungkin akan terlibat dalam konflik, mendukung negara-negara yang menghadapi ancaman Tiongkok.

Eskalasi konflik dapat berujung pada konflik bersenjata yang luas, dengan dampak negatif yang besar bagi stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Skenario Deeskalasi Konflik

Deeskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama antara negara-negara yang terlibat. Ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi, seperti membangun pangkalan militer di wilayah yang disengketakan atau melakukan latihan militer di dekat wilayah sengketa. Sebagai gantinya, negara-negara yang terlibat harus fokus pada pembangunan ekonomi di kawasan tersebut, yang dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerja sama regional.

Langkah konkret yang dapat diambil untuk mendeeskalasi konflik meliputi:

- Mendorong dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Negosiasi harus fokus pada penyelesaian sengketa melalui jalur damai, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan.
- Membangun mekanisme kerja sama regional untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara negara-negara yang terlibat. Mekanisme ini dapat berupa forum untuk komunikasi dan pertukaran informasi, serta mekanisme untuk pengawasan bersama atas aktivitas di Laut Tiongkok Selatan.
- Mendorong pembangunan ekonomi di kawasan tersebut untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerja sama regional. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui proyek-proyek infrastruktur bersama, investasi bersama, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan.
- Menghindari tindakan yang dapat memperburuk konflik, seperti membangun pangkalan militer di wilayah yang disengketakan. Tindakan seperti ini hanya akan meningkatkan ketegangan dan memperumit situasi.
- Meningkatkan kerja sama dalam bidang maritim, seperti pencemaran laut dan pencarian dan penyelamatan. Kerja sama dalam bidang maritim dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara yang terlibat, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Deeskalasi konflik membutuhkan komitmen dari semua negara yang terlibat. Dialog dan kerja sama merupakan kunci untuk menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan dan menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Kegagalan untuk mendeeskalasi konflik dapat berujung pada eskalasi yang lebih luas, dengan potensi melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara lain, yang dapat menyebabkan konflik bersenjata yang luas dan berdampak negatif yang besar bagi stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Langkah Preventif

Langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan meliputi diplomasi, kerja sama, dan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan mengurangi risiko konflik.

Langkah diplomatik dapat berupa dialog, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dialog yang berfokus pada penyelesaian sengketa melalui jalur damai, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan, dapat dilakukan melalui forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) atau melalui jalur bilateral antara negara-negara yang terlibat. Negosiasi harus fokus pada penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan, misalnya dengan melibatkan pengadilan internasional seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau melalui mekanisme arbitrase internasional.

Kerja sama dapat mencakup berbagi informasi, patroli bersama, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara negara-negara yang terlibat, dapat dibentuk forum untuk komunikasi dan pertukaran informasi serta mekanisme untuk pengawasan bersama atas aktivitas di Laut Tiongkok Selatan. Patroli bersama dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang disengketakan untuk mencegah insiden yang dapat memicu eskalasi konflik. Pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan, seperti proyek-proyek infrastruktur bersama, investasi bersama, dan pengembangan sumber daya laut, dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerja sama regional.

Pengembangan ekonomi dapat menciptakan peluang kerja sama dan mengurangi ketegangan di kawasan. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui proyek-proyek infrastruktur bersama, seperti pembangunan pelabuhan dan infrastruktur transportasi, investasi bersama dalam industri maritim, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan.

Implikasi terhadap Kepentingan Indonesia

Konflik Laut Tiongkok Selatan memiliki implikasi strategis bagi Indonesia, yang memiliki kepentingan vital di wilayah tersebut. Pertama, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur pelayaran penting bagi Indonesia, yang menghubungkan jalur perdagangan dan transportasi antar negara di Asia Tenggara dan sekitarnya. Sekitar 50% perdagangan Indonesia melewati Laut Tiongkok Selatan, sehingga konflik di wilayah tersebut dapat mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan gangguan terhadap jalur pelayaran dapat menyebabkan penundaan pengiriman barang, peningkatan biaya logistik, dan penurunan investasi asing. Kedua, Indonesia juga memiliki klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan, yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Perselisihan teritorial ini dapat memicu konflik yang berpotensi merugikan Indonesia, seperti hilangnya akses terhadap sumber daya alam di wilayah yang disengketakan, dan penurunan ketahanan pangan dan energi nasional. Ketiga, meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, termasuk pembangunan pulau buatan dan peningkatan kekuatan militer, menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia mengenai potensi ancaman militer dan keamanan di kawasan tersebut. Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanannya untuk menanggapi potensi ancaman dari Tiongkok.

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan, yang berpotensi berdampak negatif bagi Indonesia. Risiko terjebak dalam konflik atau terdampak secara ekonomi semakin besar jika konflik tersebut semakin meluas atau berujung pada pertempuran bersenjata. Risiko lain yang ditimbulkan adalah meningkatnya ketidakpastian politik dan ekonomi di kawasan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investor asing. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan melalui diplomasi dan kerja sama regional. Diplomasi dapat dilakukan melalui dialog bilateral dan multilateral, dengan menekankan penyelesaian konflik melalui jalur damai, berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan. Kerja sama regional dapat diwujudkan melalui forum-forum regional, seperti ASEAN, dan melalui mekanisme kerja sama maritim, seperti patroli bersama dan penanggulangan bencana.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Konflik di Laut Tiongkok Selatan sangat berpotensi tinggi mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global, sehingga masing-masing pihak yang terlibat akan menahan diri (grey area) untuk tidak melakukan tindakan agresif yang meningkatkan eskalasi konflik menjadi perang terbuka hingga lima tahun ke depan.

Untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas, negara-negara di kawasan harus bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Indonesia, sebagai negara dengan kepentingan strategis di Laut Tiongkok Selatan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Berikut beberapa rekomendasi untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas di Laut Tiongkok Selatan:

- Mendorong dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam dialog bilateral dan multilateral antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa, dengan menekankan penyelesaian konflik melalui jalur damai dan berdasarkan hukum internasional.
- Membangun mekanisme kerja sama regional untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara negara-negara yang terlibat. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN, serta dalam mekanisme kerja sama maritim seperti patroli bersama dan penanggulangan bencana.
- Mendorong pembangunan ekonomi di kawasan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerja sama regional. Indonesia dapat mendorong investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan, dengan fokus pada sektor maritim seperti perikanan, pariwisata, dan energi, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan.
- Menghindari tindakan yang dapat memperburuk konflik, seperti membangun pangkalan militer di wilayah yang disengketakan. Indonesia dapat mengambil sikap yang tegas dalam menolak klaim teritorial yang tidak sah dan melawan upaya militerisasi di Laut Tiongkok Selatan.
- Meningkatkan kerja sama maritim, seperti pencemaran laut dan pencarian dan penyelamatan. Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan dalam bidang keamanan maritim, seperti patroli bersama, penanggulangan bencana, dan penegakan hukum di laut.

Dengan komitmen dari semua negara, termasuk Indonesia, konflik di Laut Tiongkok Selatan dapat dicegah dan stabilitas di kawasan dapat dipertahankan.